

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Rumah

Manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya serta mencapai kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan tersebut disebut dengan kebutuhan primer, kebutuhan primer adalah kebutuhan pertama dan harus dipenuhi, karena apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka kelangsungan hidup manusia akan terancam. Kebutuhan primer tersebut menyangkut :

1. Sandang (pakaian)
2. Pangan (makanan)
3. Papan (rumah/tempat tinggal) (Deliarnov, 2006)

Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara 1945 pasal 28H setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, untuk itu setiap manusia berhak memiliki rumah dan tempat tinggal atau rumah yang layak, guna menjamin keberlangsungan hidup supaya lebih baik. Rumah dalam pengertian umum adalah salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi penghuninya. Sedangkan dalam pengertian khusus, rumah mengacu pada konsep-konsep sosial kemasyarakatan yang terjalin di dalam bangunan tempat tinggal seperti keluarga hidup, makan, tidur, beraktivitas, dan lain-lain.

Menurut Undang-Undang No.1 tahun 2011 tentang perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni sebagai tempat sarana membina keluarga, cermin harkat dan martabat penghuninya, serta aset pemilikinya. Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.

Bangunan (rumah) merupakan wadah bagi manusia (keluarga) dalam mempertahankan kehidupan menjadi tempat berlindung dan melakukan kegiatan

sosial (Marlina S. S, 2005). Sedangkan menurut World Health Organization (WHO) mendefinisikan rumah sebagai struktur fisik atau bangunan untuk tempat berlindung, dimana lingkungan tersebut berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani serta keadaan sosialnya baik untuk kesehatan keluarga dan individu (WHO, 2001).

Rumah juga dapat diartikan sebagai tempat untuk berumah tangga tempat tinggal atau alamat lokasi tempat tinggal bagian dari eksistensi individu atau keluarga terkait dengan status, tempat kedudukan identitas bagian dari kawasan fungsional kota, investasi (keluarga atau perusahaan), sumber bangkitan pergerakan (*trip production*) ruang untuk rekreasi ruang yang digunakan untuk menjalin kehidupan keluarga, serta wadah sebagai batas privasi (Haryanto,S.Sn,M.Sn, 2019).

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembina keluarga, cermin harkat dan martabat penghuninya serta aset pemilikinya.

Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa upaya masyarakat. Perumahan swadaya adalah kumpulan rumah swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas. Penyelenggaraan rumah dan perumahan diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 55 Undang-Undang No.1 tahun 2011. Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur. Ruang lingkup penyelenggaraan perumahan menurut pasal 19 ayat 1 Undang-Undang No.1 tahun 2011, meliputi:

1. Perencanaan perumahan.
2. Pembangunan perumahan.
3. Pemanfaatan perumahan.
4. Pengendalian perumahan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011 menyatakan bahwa penyelenggaraan kawasan permukiman merupakan suatu wujud pertanggungjawaban pemerintah dalam penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau yang memenuhi kriteria sehat, aman dan harmonis, teratur, serasi dan menjamin kepastian bermukim. Hal tersebut diwujudkan pemerintah program pembangunan rumah secara bertahap dan berkelanjutan dan dikhususkan kepada

masyarakat berpenghasilan rendah dengan memberikan kemudahan pembiayaan, pembangunan, prasarana, sarana, utilitas keringanan biaya, perizinan, bantuan stimulan dan insentif fiskal.

2.2 Rumah Tidak Layak Huni

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No.20 tahun 2017 pasal 1 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu dan Sarling). Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat dengan Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial. Rehabilitasi Sosial Rutilahu adalah proses pengembalian keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi Rutilahu baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.

Kriteria Rutilahu yang dapat diperbaiki meliputi :

- a. Dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni
- b. Dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk
- c. Lantai terbuat dari tanah, papan, bambu atau/semen, atau keramik dalam kondisi rusak
- d. Tidak memiliki tempat mandi, cuci dan kakus dan/atau
- e. Luas lantai kurang dari 7,2 M² per-orang (tujuh koma dua meter persegi per-orang).

Kriteria rumah tidak layak huni yang dapat diperbaiki berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 20 tahun 2017 meliputi:

- a. Kondisi dinding dan atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni
- b. Dinding dan atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak atau lapuk
- c. Lantai terbuat dari tanah, papan, bambu atau semen atau keramik dalam kondisi rusak
- d. Tidak memiliki tempat mandi, cuci dan kakus serta
- e. Luas lantai kurang dari 7,2M² per-orang (tujuh koma dua meter persegi per-orang).

Sedangkan menurut Undang-Undang no 4 tahun 1992 rumah tidak layak huni merupakan rumah tinggal yang tidak layak untuk dihuni dilihat dari aspek kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah kualitas fisik rumah diukur dengan tiga variabel yaitu :

1. Jenis atap terluas
2. Jenis dinding terluas dan
3. Lantai terluas

Kriteria rumah tidak layak huni menurut (Nuryetty, 2011) adalah

1. Luas lantai perkapita

Luas lantai rumah per-kapita merupakan suatu kriteria penentu ketidaklayakan hunian. Kriteria ketidaklayakan menurut luas lantai perkapita di

perkotaan adalah kurang dari empat m² dan di pedesaan kurang dari 10m²

2. Jenis atap

Jenis atap rumah yang terbuat dari daun atau lainnya merupakan salah satu kriteria dari rumah tidak layak huni

3. Jenis dinding rumah

Kriteria ketidaklayakan dinding adalah jenis dinding yang terbuat dari bambu atau lainnya.

4. Jenis lantai rumah

5. Jenis lantai rumah dengan tanah merupakan kriteria ketidaklayakan sebuah hunian (Nuryetty & dkk, 2011).

2.3 Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

2.3.1 Definisi Program

Penyelenggaraan perumahan di Indonesia diwujudkan melalui berbagai program definisi program yang dikemukakan oleh Dr.Niccoleta (2010) ditulis: Wahyudi (2010) program merupakan aksi sebagai tujuan untuk menciptakan perubahan dan harus diimplementasikan dengan memberikan arti yang jelas supaya hasil sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Menurut Sudjana (2010) ditulis: Wahyudi (2010) program dapat diartikan sebagai kegiatan yang disusun secara terencana dan memiliki tujuan, sasaran, isi, jenis kegiatan, pelaksanaan, proses kegiatan, waktu, fasilitas, alat-alat, biaya dan sumber-sumber pendukung lainnya. Secara lebih luas, program yaitu kegiatan yang memiliki komponen, proses dan tujuan program yang diselenggarakan oleh perorangan, lembaga, institusi, dengan dukungan sarana prasarana yang diorganisasi dan dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan hidup manusia.

Dalam penyediaan perumahan, Pemerintah Indonesia juga menjalankan beberapa peranan dalam pembangunan perumahan dan permukiman. Pemerintah saat ini bertindak sebagai pembangun dan penyedia perumahan dan sebagai pemberi kemudahan (*fasilitator*) dan penopang masyarakat supaya mampu melakukan pembangunannya sendiri (Tjuk Kuswartojo, 2005).

Salah satu program pemerintah dalam penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dikenal dengan Program BSPS program ini merupakan

salah satu wujud dari peran Pemerintah dalam pembangunan perumahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.07/PRT/M/2018 tentang program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang disingkat BSPS adalah bantuan yang diberikan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas umum yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

2.3.2 Tujuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Tujuan adanya program BSPS Berdasarkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yaitu peningkatan kualitas rumah swadaya yang disingkat PKRS adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat dan Pengembangan Baru Rumah Swadaya (PBRS) yaitu kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara per-seorangan atau berkelompok dan juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat supaya mampu meningkatkan kualitas rumah secara swadaya.

Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud untuk memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni dengan memenuhi persyaratan

- a. Keselamatan bangunan
Keselamatan bangunan meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan bangunan penutup atap, lantai dan dinding bangunan.
- b. Kesehatan penghuni meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, kakus.
- c. Kecukupan minimum luas bangunan
Kecukupan minimum luas meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan bangunan tujuannya untuk memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni.

Sedangkan kegiatan PBRS sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan oleh penerima program BSPS dapat dilakukan untuk :

- a. Pembangunan rumah baru pengganti rumah rusak total atau.
- b. Pembangunan rumah baru diatas kavling tanah matang.

Program BSPS yang diberikan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah berbentuk uang dan barang, BSPS dalam bentuk uang digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja keseluruhan senilai Rp.17.500.000,00 sedangkan BSPS dalam bentuk barang berupa prasarana,

sarana dan utilitas yang merupakan insentif bagi kepala penerima bantuan yang telah melaksanakan kegiatan.

2.3.3 Target Capaian Program BSPS

Program yang dicanangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini dilaksanakan untuk mengurangi jumlah RTLH dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan untuk memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman (Comal, 2019).

Badan Pusat Statistik pada tahun 2015 mencatat jumlah RTLH di Indonesia sebanyak 2,51 juta unit dengan rincian 2,18 juta rawan layak huni dan 0,33 juta benar-benar tidak layak huni. Pekerjaan rumah pemerintah dalam RPJMN 2015-2019 adalah menurunkan jumlah RTLH dari 2,51 juta unit menjadi 1,9 juta unit. Menurut (Syarif, 2019) BSPS merupakan bantuan pemerintah berupa stimulan bagi MBR untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan atau peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum (Sindo, 2019).

2.3.4 Indikator Penerima Program BSPS

Persyaratan penerima program BSPS berdasarkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yaitu Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga
- b. Memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah (tidak dalam status sengketa dan memenuhi tata ruang Wilayah)
- c. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni
- d. Belum pernah memperoleh BPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan
- e. Berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah Provinsi dan
- f. Bersedia berswadaya membentuk KPB dengan pernyataan tanggung jawab renteng.

Berdasarkan pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat proses penyelenggaraan Program BPS harus dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut :

- a. Pengusulan lokasi BPS
- b. Penetapan lokasi

- c. Penyiapan masyarakat
- d. Penetapan calon penerima BSPS
- e. Pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan BSPS bentuk barang dan
- f. Pengadaan dan penyerahan BSPS bentuk barang dan
- g. Pelaporan

Tahap penyiapan masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 17 yaitu sebagai berikut:

1. Penyiapan masyarakat dilaksanakan pada lokasi BSPS.
2. Penyiapan masyarakat dilakukan melalui pendampingan oleh tenaga fasilitator untuk memberdayakan masyarakat calon penerima BSPS.
3. Tenaga fasilitator melakukan pendampingan dalam tahap sebagai berikut:
 - a. Perencanaan
Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 meliputi kegiatan :
 1. Sosialisasi dan/atau penyuluhan
 2. Verifikasi calon penerima bsp
 3. Kesepakatan calon penerima bsp kesepakatan ini dilakukan melalui rembuk warga menentukan calon penerima bsp, membentuk kelompok penerima bantuan dan kesepakatan untuk tanggung renteng dalam pelaksanaan kegiatan BSPS dan menentukan toko/penyedia bahan bangunan.
 4. Identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal, kegiatan ini dilakukan melalui rembuk warga
 - b. Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 meliputi kegiatan bimbingan teknis dalam pemeriksaan kuantitas bangunan.
 - c. Pengawasan
Tahap pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 meliputi kegiatan pemantauan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan antar sesama anggota Kelompok Penerima Bantuan(KPB)
 - d. Pelaporan
Tahap pelaporan yaitu meliputi bimbingan teknis dalam menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan BSPS.
 - e. Pengembangan mandiri pasca kegiatan
 - f. Pengembangan mandiri pasca kegiatan meliputi bimbingan teknis dan *supervise* dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan terhadap hasil kegiatan BSPS.

2.4 Dampak Program dari Segi Sosial dan Ekonomi

2.4.1 Definisi Dampak

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia online, 2010 dampak secara sederhana dapat diartikan sebagai pengaruh atau akibat dari suatu kegiatan sehingga memberikan dampak yang dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Berdasarkan penjabaran diatas maka dapat dibedakan ke dalam

dua pengertian yaitu dampak positif dan dampak negatif.

1. Dampak positif adalah pasti dan tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. Positif juga merupakan suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan yang menjemukan kegembiraan dari pada kesedihan, optimis dari dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.
2. Dampak negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positif lainnya sehingga dapat disimpulkan pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya.

Menurut Joko Widodo dalam (Widiawati, 2017), dampak merupakan suatu perubahan yang terjadi di lingkungan internal (*internal environment*) maupun lingkungan eksternal (*external environment*) dapat menimbulkan suatu dampak yang dikehendaki (*intended impact*) maupun yang tidak dikehendaki (*unintended impact*).

Menurut Fithriana (2008) dampak dari suatu kebijakan mempunyai beberapa dimensi yaitu :

- a. Pengaruh atau akibat dari suatu kebijakan baik yang diharapkan atau tidak diharapkan atau keduanya yang melibatkan seluruh masyarakat.
- b. Kebijakan yang memberikan dampak pada situasi dan kelompok lain atau dapat disebut dengan eksternalitas atau *spilloper effect*
- c. Kebijakan dapat mempunyai pengaruh di masa mendatang seperti pengaruhnya pada kondisi yang ada saat ini
- d. Kebijakan mempunyai dampak yang tidak langsung atau yang merupakan pengalaman dari suatu komunitas atau beberapa anggota diantaranya (Agustino, 2008).

Goulet (2014) juga menyatakan bahwa dalam suatu kebijakan harus melahirkan suatu manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan dari suatu program bagi penerima bantuan adalah:

- a. Program yang ada mampu mengurangi beban hidup masyarakat miskin, karena mereka tidak lagi memiliki tanggungan untuk membuat rumah.
- b. Secara psikologis mampu meningkatkan rasa percaya diri karena rumah yang ditempati kondisinya lebih baik dibandingkan sebelumnya
- c. Meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin karena penghasilan yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pembangunan rumah bisa dikondisikan untuk memenuhi kondisi dasar hidup lainnya.
- d. Dengan kondisi rumah yang memenuhi kondisi kriteria rumah layak huni maka akan meningkatkan kondisi kesehatan.
- e. Memberikan rasa aman bagi penghuninya
- f. Mewujudkan ketahanan ekonomi
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan Agustino (2014) dan Leo (2014).

Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat dampak program BSPS terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat setelah adanya program BSPS yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pengentasan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Pagelaran Utara. Menurut Goulet (2014), ditulis Agustino et.al (2014:158) manfaat program BSPS program ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terpenuhinya sandang, pangan dan papan, lapangan kerja dan untuk jangka Panjang mampu menurunkan angka kemiskinan dan juga berdampak pada kualitas kesehatan, keamanan, psikologis dan sosial masyarakat penerima bantuan.

Selain itu menurut Marlina kondisi rumah yang kurang sehat, hunian yang kurang memadai mengakibatkan kondisi yang tidak sehat bagi penghuninya. Kondisi rumah yang tidak sehat akan menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks sehingga membutuhkan penanganan yang serius. Terpenuhinya kebutuhan akan perumahan yang layak bagi masyarakat dapat mengurangi beban masyarakat, meningkatkan mutu dan taraf hidup lainnya seperti Pendidikan, kesehatan dan peningkatan kualitas sandang dan pangan yang menjadi syarat terwujudnya kesejahteraan masyarakat (Marlina S, 2005:63).

1.4.2 Definisi Ekonomi dan Sosial

Ekonomi adalah sebuah cabang ilmu sosial yang berobjek pada individu dan masyarakat, secara etimologis dapat diartikan ekonomi terdiri dari dua suku kata yaitu *oikos* dan *nomos* yang berarti tata laksana rumah tangga. Definisi ekonomi secara utuh yaitu suatu ilmu yang memberikan pengetahuan dan pengertian mengenai gejala masyarakat yang timbul karena perbuatan manusia untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai kemakmuran. Lebih lanjut definisi lain ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang kekayaan dan merupakan suatu bagian yang penting daripada studi tentang manusia (rosyidi, 2009).

Menurut Departemen Sosial kata sosial adalah suatu acuan dalam berinteraksi antar manusia dalam konteks masyarakat atau komunitas, sebagai acuan berarti bersifat abstrak yang berisi simbol-simbol yang berkaitan dengan pemahaman terhadap lingkungan, fungsi dari sosial mengatur tindakan-tindakan yang muncul dari individualisme atau masyarakat (Departemen Sosial, 2019).

Menurut Enda (2010), sosial adalah cara tentang bagaimana individu saling berhubungan. Sedangkan menurut (Daryanto, 1998) sosial merupakan sesuatu yang menyangkut aspek hidup masyarakat yang berasal dari kata "*socius*" yang berarti segala sesuatu yang lahir, yang tumbuh dan berkembang secara bersama-sama.

Mac Iver (2007) ditulis: Soekanto (2007) mendefinisikan masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan dan kebebasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia keseluruhan yang selalu berubah. Masyarakat merupakan jaringan sosial yang selalu berubah.

Unsur-unsur perasaan masyarakat antara lain adalah seperasaan, sepenanggungan dan saling memerlukan sedangkan tipe-tipe masyarakat dalam Kingley Davis (2007) ditulis: Soekanto (2007) ada empat kriteria yaitu:

1. Jumlah penduduk
2. Luas kekayaan dan kepadatan penduduk daerah pedalaman
3. Fungsi-fungsi khusus masyarakat terhadap masyarakat setempat terhadap seluruh masyarakat.
4. Organisasi masyarakat yang bersangkutan.

Dampak sosial masyarakat menurut (Bintaro,1989) ditulis Indarto et.al (2015) perubahan suatu lingkungan akan dipengaruhi oleh lingkungan itu sendiri, manusia dan pola aktivitasnya. Perubahan yang terjadi dapat dijelaskan dalam tiga bentuk perubahan yakni perubahan perkembangan, perubahan lokasi dan perubahan perilaku. Penjelasan mengenai perubahan tersebut sebagai berikut:

1. Perubahan perkembangan, yaitu perubahan yang terjadi setempat dimana perubahan-perubahan itu masih dapat dilaksanakan di tempat itu dengan tidak perlu mengadakan suatu perpindahan.
2. Perubahan lokasi dari suatu unit kegiatan, yakni perubahan yang terjadi di suatu tempat yang mengakibatkan adanya suatu rencana atau gejala perpindahan suatu bentuk aktivitas atau perpindahan sejumlah penduduk di daerah itu ke daerah lain.
3. Perubahan perilaku perubahan ini meliputi perubahan sikap perilaku atau tata laku penduduk setempat dalam usaha menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di daerah tersebut.

Psikologis sosial merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang berusaha memahami dan menjelaskan bagaimana pikiran, perasaan dan tingkah laku seseorang yang dipengaruhi oleh kehadiran orang lain, baik secara nyata aktual dalam bayangan imajinasi atau dalam kehadiran secara langsung Gordon Alford ditulis: Katnawati (2018).

2.4.3 Faktor Yang Mempengaruhi Ekonomi

Faktor yang dapat menentukan tinggi rendahnya sosial ekonomi masyarakat diantaranya tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, kondisi lingkungan, tempat tinggal, pemilikan kekayaan dan partisipasi dalam aktivitas kelompok dari komunitasnya. Dalam hal ini uraian dibatasi hanya 4 faktor yang menentukan yaitu tingkat pendidikan, pendapatan, dan kepemilikan kekayaan dan jenis pekerjaan (Kurnianto, 2017).

a. Tingkat pendidikan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 pasal 3, pendidikan bertujuan untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu beriman, bertaqwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan bertanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu diselenggarakan pendidikan baik secara pendidikan sekolah (formal) maupun pendidikan luar sekolah (non formal). Jalur Pendidikan sekolah (pendidikan formal) terdapat jenjang pendidikan sekolah, pada dasarnya terdiri dari pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Dalam penelitian ini tingkat pendidikan dilihat dari jenjang pendidikan formal terakhir. Karena tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap jenis pekerjaan dan pendapatan yang diperoleh.

b. Pendapatan

Pendapatan adalah jumlah semua hasil suatu pekerjaan yang diterima oleh kepala keluarga maupun anggota keluarga lainnya yang diwujudkan dalam bentuk uang dan barang. Menurut Sumardi dalam (Yerikho, 2007) mengemukakan bahwa pendapatan yang diterima penduduk akan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang ditempuh. Dengan pendidikan yang tinggi mereka akan dapat memperoleh kesempatan yang lebih luas. Sedangkan penduduk yang berpendidikan rendah akan mendapat pekerjaan dengan pendapatan rendah

c. Pemilikan kekayaan dan fasilitas

Pemilikan kekayaan atau fasilitas adalah kepemilikan barang berharga yang memiliki nilai tinggi dalam suatu rumah tangga. Kepemilikan kekayaan atau fasilitas tersebut diantaranya:

1. Barang-barang berharga kepemilikan kekayaan yang bernilai ekonomis dalam berbagai bentuk dan ukuran seperti perhiasan, televisi, kulkas dan lain-lain dapat menunjukkan adanya pelapisan dalam masyarakat.

2. Jenis-jenis kendaraan pribadi

Kendaraan pribadi dapat digunakan sebagai alat ukur tinggi rendahnya tingkat sosial ekonomi keluarga. Misalnya orang yang mempunyai mobil akan merasa lebih tinggi tingkat taraf ekonominya

dari pada orang yang mempunyai sepeda motor.

d. Jenis pekerjaan

Menurut (Manginsihi, 2013). Pekerjaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencari nafkah. Pekerjaan yang ditekuni oleh setiap orang berbeda-beda, perbedaan itu akan menyebabkan perbedaan tingkat penghasilan dari yang rendah sampai pada tingkat yang tinggi.

Selain itu dijelaskan oleh Supartono et.al (2011) untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu lingkungan dapat dilihat dari segi ekonomi dan sosialnya. Variabel ekonomi untuk melihat tingkat kesejahteraan tersebut meliputi tingkat pendapatan, besarnya pengeluaran perbulan, atau belanja atau konsumsi baik untuk pangan maupun non pangan serta tingkat produksi investasi dan lain sebagainya.

2.4.4 Dampak Ekonomi Setelah Adanya Program Peningkatan Kualitas Rumah

Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat dampak ekonomi setelah adanya program berdasarkan peneliti terdahulu dampak setelah adanya program perumahan sebagai berikut:

Menurut Indarto (2015) dan Rahayu (2015) dampak ekonomi setelah adanya pembangunan perumahan yaitu:

1. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan
2. Penambahan fungsi rumah membuka lapangan usaha masyarakat dan
3. Meningkatnya harga lahan.

Dampak implementasi program terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dari segi ekonomi berdasarkan hasil penelitian (Hariyani, 2016) berupa:

1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin karena dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan membangun rumah bisa dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
2. Terpenuhinya sandang, pangan dan perumahan
3. Lapangan kerja dan
4. Menurunkan angka kemiskinan

Menurut Marlina S.S (2005) dampak terpenuhinya rumah yang layak huni

bagi masyarakat mampu mengurangi beban dan meningkatkan mutu dan taraf hidup masyarakat dampak adanya program perbaikan kualitas rumah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pendidikan
2. Meningkatkan kesehatan
3. Meningkatkan kualitas sandang
4. Meningkatkan kualitas pangan

Dampak program BPS menurut Theresia et.al ditulis Agustino (2014) dan Leo (2014) dampak program BPS mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mampu meningkatkan kualitas:

1. sandang
2. Pangan
3. Papan
4. Lapangan kerja menurunkan kemiskinan
5. Meningkatkan kualitas kesehatan
6. Keamanan psikologis

2.4.5 Identifikasi Variabel

Pada tahap sintesa penelitian ini dilakukan identifikasi variabel yang dianggap mampu menjadi penentu yang akan menggambarkan dampak program BPS, aspek indikator dan variabel sebagai berikut:

TABEL II. 1
IDENTIFIKASI VARIABEL EKONOMI BERDASARKAN PENELITIAN TERDAHULU

No	Sumber	Tahun	Variabel
1	Indarto & rahayu	2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan 2. Fungsi rumah 3. Lapangan usaha 4. Harga lahan.
2	Hariyani	2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sandang,pangan dan perumahan 2. Lapangan kerja dan 3. Kemiskinan

No	Sumber	Tahun	Variabel
3	Marlina s.s	2005	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Sandang 4. Pangan
4	Theresia et al dalam (agustino & leo,)	2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sandang 2. Pangan 3. Papan 4. Lapangan kerja 5. Kemiskinan 6. Kesehatan 7. Keamanan psikologis

Sumber :Peneliti,2020

Variabel yang telah didapatkan tidak seluruhnya digunakan dalam analisis maka perlu dilakukan verifikasi untuk memilih variabel yang sesuai dalam melakukan penelitian mengenai Dampak Program BSPS dalam Pengentasan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Pagelaran Utara. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mengeliminasi variabel yang kurang sesuai dan penggabungan atau peleburan variabel yang memiliki kesamaan.

TABEL II. 2
JUSTIFIKASI VARIABEL EKONOMI BERDASARKAN PENELITIAN TERDAHULU

No	Sumber	Variabel	Keterangan	Justifikasi
1	Indarto&Rahayu, 2015	Pendapatan	Variabel ini dipilih menjadi salah satu variabel yang akan dianalisis	Variabel ini dipilih karena salah satu faktor yang mempengaruhi ekonomi adalah pendapatan, Selain itu menurut (Supartono dkk,2011) untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu lingkungan dapat dilihat dari segi ekonomi dan sosial variabel ekonominya meliputi tingkat pendapatan.
2		Fungsi rumah	Variabel ini tidak diambil	Karena sudah membahas variabel tentang terpenuhinya perumahan
3		Lapangan usaha	Variabel ini tidak diambil	Variabel ini tidak diambil karena kurang sesuai dengan sasaran peneliti.
4		Harga lahan	Variabel ini tidak diambil	Variabel ini tidak diambil karena peneliti lebih fokus terhadap dampak ekonomi dan sosial
5				Variabel ini

No	Sumber	Variabel	Keterangan	Justifikasi
		Perumahan	diambil menjadi salah satu variabel yang akan dianalisis	Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 1945 setiap orang berhak memiliki rumah dan memiliki tempat tinggal yang layak.
6		Lapangan Kerja	Variabel ini tidak diambil	Variabel ini sama dengan variabel dari Theresia Et Al dalam (Agustino & Leo) sehingga di lebur
7		Kemiskinan	Variabel ini tidak diambil	Kurang spesifik sehingga tidak diambil variabel sebelumnya lebih spesifik yang dibahas di dalam dampak sosial setelah adanya program BSPS yaitu meringankan beban bagi masyarakat miskin
8		Pendidikan	Variabel ini diambil menjadi salah satu variabel yang akan dianalisis	Variabel ini dipilih karena Karena salah satu faktor yang mempengaruhi ekonomi adalah Pendidikan sehingga dalam mengukur dampak ekonomi setelah adanya program ini dilihat dari peningkatan pendidikan.
9	Marlina S.S,2005	Meningkatkan kesehatan	Variabel ini diambil menjadi salah satu variabel yang akan dianalisis	Variabel ini dipilih karena Karena salah satu faktor yang mempengaruhi ekonomi adalah kesehatan sehingga dalam mengukur dampak ekonomi setelah adanya program ini dilihat dari peningkatan kesehatan yang diterima oleh masyarakat.
10		Sandang	Variabel ini tidak diambil	Variabel ini sama dengan variabel dari Theresia Et Al dalam (Agustino & Leo) sehingga dilebur
11		Pangan	Variabel ini tidak diambil	Variabel ini sama dengan variabel dari Theresia Et Al dalam (Agustino & Leo) sehingga dilebur
12		Sandang	Variabel ini diambil menjadi salah satu variabel yang akan dianalisis	Variabel ini dipilih karena menurut (deliarnov, 2006) sandang pangan dan papan merupakan kebutuhan primer apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka keberlangsungan hidup manusia akan terancam
13		Pangan	Variabel ini diambil menjadi salah satu variabel yang akan dianalisis	Variabel ini dipilih karena menurut (deliarnov 2006) sandang pangan dan papan merupakan kebutuhan primer apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka keberlangsungan hidup manusia akan terancam.
14	Theresia Et Al dalam (Agustino & Leo)	Papan	Variabel ini tidak diambil	Variabel ini sama dengan variabel dari (Hariyani, 2016) sehingga di lebur
15		Lapangan Kerja	Variabel ini diambil menjadi salah satu variabel yang akan dianalisis	Variabel ini dipilih karena salah satu faktor yang mempengaruhi ekonomi adalah lapangan kerja.
16		Kemiskinan	Variabel ini tidak diambil	Kurang spesifik sehingga tidak diambil variabel sebelumnya lebih spesifik yang dibahas di dalam dampak sosial setelah adanya program BSPS yaitu meringankan

No	Sumber	Variabel	Keterangan	Justifikasi
				beban bagi masyarakat miskin
17		Kesehatan	Variabel ini tidak diambil	Variabel ini sama dengan variabel dari Marlina S.S sehingga dilebur
18		Keamanan psikologis	Variabel ini tidak diambil	Variabel ini sudah dibahas dalam dampak sosial setelah adanya program BSPS sehingga tidak dibahas lagi supaya tidak mengulang bahasan yang sama.

Sumber:Peneliti,2020

2.4.6 Dampak Sosial Setelah Adanya Program Peningkatan Kualitas Rumah

Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat dampak sosial setelah adanya program berdasarkan peneliti terdahulu dampak setelah adanya program perumahan sebagai berikut:

Dampak pembangunan perumahan terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat sekitar di Kelurahan Sambiroto Kecamatan Timbalang hasil penelitian Indarto (2015) dan Rahayu (2015) mengelompokkan dampak sosial berupa:

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial
2. Meningkatnya aktivitas masyarakat
3. Perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih konsumtif dan
4. Menurunnya tingkat kriminalitas.

Dampak sosial merupakan pengaruh sosial yang terjadi setelah adanya suatu program dan merupakan perubahan yang terjadi terhadap manusia misalnya hubungan atau interaksi antar individu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Qomaria, 2015) Dampak yang dilihat setelah adanya program BSPS yaitu :

1. Memberikan perubahan sosial yang baik bagi warga setempat perubahan yang terjadi pada masyarakat mengenai nilai-nilai sosial
2. Norma-norma sosial
3. Pola-pola perilaku organisasi
4. Susunan lembaga kemasyarakatan
5. Lapisan-lapisan dalam masyarakat kekuasaan dan wewenang serta;
6. Interaksi sosial

Dampak sosial yang terjadi setelah adanya program bedah rumah memberikan dampak positif terhadap masyarakat miskin karena program ini mampu meringankan beban anggaran untuk pembangunan rumah bagi masyarakat miskin

dan mampu menjadi program pengentasan kemiskinan yang cukup berhasil dan mampu mengurangi rumah tidak layak huni (Widiawati, 2017).

Dampak implementasi program terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh (Hariyani, 2016) mengenai dampak implementasi program dari segi sosial adalah sebagai berikut :

1. Mengurangi beban hidup masyarakat
2. Meningkatkan rasa percaya diri masyarakat
3. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
4. Memberikan rasa aman kepada masyarakat
5. Psikologis dan sosial masyarakat.

2.4.7 Identifikasi Variabel

Pada tahap ini akan dilakukan identifikasi variabel yang dianggap mampu menjadi penentu yang akan menggambarkan dampak program BSPS, aspek indikator dan variabel sebagai berikut :

TABEL II. 3
IDENTIFIKASI VARIABEL SOSIAL BERDASARKAN PENELITIAN
TERDAHULU

NO	SUMBER	TAHUN	VARIABEL
1	Indarto & Rahayu	2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi masyarakat 2. Aktivitas masyarakat 3. Masyarakat lebih konsumtif 4. Tingkat kriminalitas.
2	Qomaria	2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai-nilai sosial, 2. Norma-norma sosial 3. Pola-pola perilaku organisasi 4. Susunan Lembaga masyarakat 5. Kekuasaan dan wewenang 6. Interaksi sosial
3	Widiawati,	2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meringankan beban masyarakat

NO	SUMBER	TAHUN	VARIABEL
4	Hariyani	2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi beban masyarakat 2. Rasa percaya diri 3. Keamanan 4. Kesehatan 5. Psikologis

Sumber :Peneliti,2020

Variabel yang telah didapatkan tidak seluruhnya digunakan dalam analisis maka perlu dilakukan verifikasi dalam melakukan penelitian mengenai Dampak program BSPS dalam Pengentasan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kecamatan Pagelaran Utara. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mengeliminasi variabel yang kurang sesuai dan penggabungan atau peleburan variabel yang memiliki kesamaan.

TABEL II. 4
JUSTIFIKASI VARIABEL BERDASARKAN PENELITIAN TERDAHULU

NO	SUMBER	VARIABEL	KETERANGAN	JUSTIFIKASI
1	Indarto&Rahayu,2015	Partisipasi masyarakat	Variabel ini diambil menjadi salah satu variabel yang akan dianalisis	Variabel ini lebih melihat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan rumah dalam sistem tanggung renteng, sehingga menurut saya variabel ini lebih menekankan pada keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan rumah.
2		Aktivitas masyarakat	Variabel ini tidak diambil	Variabel ini terlalu luas dan kurang spesifik yaitu membahas mengenai kegiatan masyarakat.
3		Masyarakat lebih konsumtif	Variabel ini diambil menjadi salah satu variabel yang akan dianalisis	Variabel ini dipilih karena menurut Goulet dalam (Agustino&Leo,2014) dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pembangunan rumah bisa dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
4		Tingkat kriminalitas	Variabel ini diambil menjadi salah satu variabel yang akan dianalisis	Variabel ini dipilih karena berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 2011 bahwa salah satu tujuan pemerintah dalam penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau adalah memberikan rasa aman, dengan adanya perbaikan kualitas rumah maka mampu mengurangi tingkat
5				

NO	SUMBER	VARIABEL	KETERANGAN	JUSTIFIKASI
				kriminalitas. Dan salah satu pengaruh dari kebijakan memberikan dampak pada situasi dan kelompok lain yang disebut dengan externalitas <i>spilloper effect</i> .
6	Qomaria, 2015	Nilai-nilai sosial	Variabel ini diambil menjadi salah satu variabel yang akan dianalisis	Variabel ini dipilih karena perubahan kondisi rumah atau suatu unit kegiatan mengakibatkan suatu rencana atau gejala perpindahan suatu bentuk aktivitas (Bintaro,1989)
7		Norma-norm sosial	Variabel ini tidak diambil	Variabel ini tidak diambil karena peneliti tidak ingin membahas mengenai kebiasaan dan perilaku masyarakat dan Batasan wilayah tertentu. Peneliti lebih mendalami mengenai dampak sosial.
8		Pola-pola perilaku organisasi	Variabel ini diambil menjadi salah satu variabel yang akan dianalisis	Variabel ini dipilih karena menurut (Bintaro,1989) dalam (Indarto & Rahayu, 2015) perubahan suatu lingkungan akan dipengaruhi oleh lingkungan itu sendiri, manusia dan pola aktivitasnya.
9		Susunan Lembaga masyarakat	Variabel ini tidak diambil	Karena masyarakat sudah memiliki susunan lembaga kemasyarakatan seperti ketua RT, RW, Camat dan lainnya sehingga variabel ini tidak perlu dibahas.
10		Kekuasaan dan wewenang	Variabel ini tidak diambil	Peneliti lebih menggali mengenai dampak sosial bukan ingin melihat lapisan, kekuasaan dan wewenang masyarakat.
11		Interaksi sosial	Variabel ini diambil menjadi salah satu variabel yang akan dianalisis	Variabel ini dipilih karena menurut Mac Iver dan Charles dalam (Soekanto,2007) masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan golongan.
12	Widiawati, 2017	Meringankan beban masyarakat	Variabel ini diambil menjadi salah satu variabel yang akan dianalisis	Variabel ini dipilih karena menurut Gaulet dalam (Agustino&Leo,2014) dengan adanya perbaikan kualitas rumah mampu mengurangi beban hidup masyarakat miskin karena mereka tidak lagi memiliki tanggungan untuk membuat rumah, selain itu menurut (Marlina,S.S, 2005) terpenuhinya kebutuhan akan perumahan yang layak bagi masyarakat dapat meningkatkan mutu dan taraf hidup lainnya seperti kesehatan, Pendidikan, kualitas sandang dan pangan.
13	Hariyani, 2016	Mengurangi beban masyarakat	Variabel ini tidak diambil	Karena sudah mengambil variabel meringankan beban bagi masyarakat miskin sehingga variabel ini tidak diambil karena jika diambil akan mengulang

NO	SUMBER	VARIABEL	KETERANGAN	JUSTIFIKASI
				pembahasan yang sama.
14		Meningkatkan rasa percaya diri	Variabel ini diambil menjadi salah satu variabel yang akan dianalisis	Variabel ini dipilih karena secara psikologis mampu meningkatkan rasa percaya diri karena rumah yang ditempati kondisinya lebih baik dari sebelumnya (Hariyani,2016).
15		Keamanan	Variabel ini diambil menjadi salah satu variabel yang akan dianalisis	Variabel ini dipilih karena salah Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 2011 bahwa salah satu tujuan pemerintah dalam penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau adalah memberikan rasa aman dan memenuhi persyaratan rumah layak huni yaitu keselamatan bangunan.
16		Kesehatan	Variabel ini tidak diambil	Variabel ini tidak diambil karena sudah dibahas di dalam dampak ekonomi setelah adanya program BSPS
17		Psikologis	Variabel ini diambil menjadi salah satu variabel yang akan dianalisis	Variabel ini dipilih karena menurut Gordon Alpard dalam (Katnawati,2018) dengan adanya program ini mampu mempengaruhi psikologi dan sosial masyarakat akibat adanya pengaruh terhadap pikiran,perasaan dan tingkah laku seseorang.

Sumber: Teori, Jurnal dan peneliti terdahulu.

2.4.8 Sintesa Pustaka

Hasil dari tahapan identifikasi sampai tahapan verifikasi variabel akan didapatkan sintesa pustaka yang akan dijadikan acuan oleh peneliti untuk menjawab sasaran penelitian, tabel sintesa penelitian sebagai berikut.

TABEL II. 5
PENETAPAN VARIABEL DARI SEGI EKONOMI DAN SOSIAL

No	Indikator	Aspek	Variabel
1	Dampak Ekonomi Setelah Adanya Program Peningkatan Kualitas Rumah	Ekonomi	Pendapatan
2			Perumahan
3			Pendidikan
4			Kesehatan
5			Sandang
6			Pangan
7			Lapangan Kerja
1	Dampak Sosial Setelah		Partisipasi masyarakat

No	Indikator	Aspek	Variabel
2	Adanya Program Peningkatan Kualitas Rumah	Sosial	Menurunnya tingkat kriminalitas
3			Masyarakat yang lebih konsumtif
4			Nilai-nilai sosial
5			Pola-pola perilaku organisasi
6			Interaksi sosial
7			Meringankan beban masyarakat
8			Meningkatkan rasa percaya diri
9			Keamanan
10			Psikologis

Sumber:Peneliti,2020